

Kunjungi LDII DIY, 35 Pendeta GPIB Dalami Kebhinekaan

YOGYA (KR) - Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) DIY menerima kunjungan 35 Pendeta Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), baru-baru ini. Silaturahmi ini menjadi salah satu agenda dalam Pelatihan ‘Kebhinekaan dan Bina Damai’ Angkatan II hasil kerja sama antara Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta dan Bidang Germasa GPIB.

ICRS sendiri merupakan konsorsium dari UGM, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta. Konsorsium ini bertujuan untuk mengembangkan studi keagamaan di Indonesia.

Adapun materi pelatihan mencakup pemahaman akan kebhinekaan agama, politik dan agama, kemunculan radikalisme berbalut agama, hubungan antaragama, agama berkaitan lingkungan hidup serta penghargaan akan beragama dan berkeyakinan. Di samping itu, para pendeta GPIB ingin mengenali

lebih dekat LDII dan beraneka ragam program kerja keagamaannya.

Ketua DPW LDII DIY Ir Atus Syahbudin SHut MAgr PhD IPU saat menerima rombongan menjelaskan tentang 8 program pengabdian LDII untuk bangsa. ”LDII DIY menempatkan 3 di antaranya sebagai unggulan, yakni Pendidikan, Ekonomi Syariah, serta Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah lama dimulai LDII,” katanya.

Dr Leonard Chrysostomos Epafras mewakili ICRS mengungkapkan ra-

sa senangnya atas penyambutan LDII. ”Perjumpaan ini meskipun singkat, namun semoga tambah mempererat persaudaraan terutama dengan LDII. Semoga menjadi langkah untuk bekerja sama,” ungkap peneliti UGM dan media affairs yang menekuni studi inter-religious, religion online, Kristen, Yahudi, dan budaya populer.

Sementara itu, Pendeta Imanuel E Raintung SSi MM, selaku perwakilan dari GPIB menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan ini. Ia pun sudah berteman lama dengan Ketum dan beberapa pengurus DPP LDII, serta mengunjungi berbagai Ponpes dalam naungan LDII.

”Kami atas nama Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, di sini dalam rangka belajar tentang kebhinekaan, dan terpilih lah Lembaga Dakwah Islam Indonesia,” jelasnya. **(Dev)-d**



Atus Syahbudin (tengah) menyematkan ecoprint kepada Leonard Chrysostomos Epafras dan Pendeta Imanuel E Raintung.

DISKUSI BULANAN SINTESIS Menuju Pemilu, Netralitas Pemerintah Dipertanyakan



Salah satu peserta diskusi saat menyampaikan pendapatnya di hadapan narasumber.

SLEMAN (KR)- Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat. Calon presiden, wakil presiden hingga calon anggota legislatif di level kabupaten/kota, provinsi hingga pusat tengah berkampanye untuk memikat hati rakyat.

Seruan agar Pemilu 2024 berjalan dengan damai datang dari berbagai kalangan, termasuk dari perguruan tinggi. Satu hal tak penting dalam terciptanya Pemilu yang damai adalah pemerintah yang memiliki sikap netral dan profesional.

Belum lama ini, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk menjamin terjaganya netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Asas netralitas yang dimiliki ASN pun diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Akan tetapi, nyatanya yang terjadi saat ini jauh dari kata netral. Netralitas pemerintah mulai dari Presiden, TNI/Polri, ASN pun dipertanyakan. ”Pemilu sulit netral, jika Presiden tidak bisa menjaga netralitasnya. Godaan orang punya kuasa, luar bisa tinggi,” kata Nyarwi Ahmad PhD, Dosen Fisipol UGM dalam Diskusi Bulanan Sintes

is Coffee & Space, Jalan Kaliurang KM 5,6 Yogyakarta, Sabtu (16/12) kemarin.

nesia merupakan Negara Republik dan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Namun kekuasaan dan wewenang presiden saat ini sangat kuat. Karakter populis Jokowi tak terjaga sehingga ia bisa mencederai demokrasi.

”Karakter populis Jokowi tidak dijaga karena ada ruang-ruang kekuasaan presiden yang luar biasa akhirnya digunakan,” ungkapnya.

Dalam diskusi yang mengambil tema ”Pemilu 2024 dan Netralitas Pemerintah” tersebut, hadir tiga narasumber. Selain Nyarwi Ahmad PhD (Dosen Fisipol UGM), hadir pula seniman dan budayawan, Butet Kartaredjasa serta Muhammad Adam, Presiden Mahasiswa UMY.

Sementara itu, Butet Kartaredjasa menyampaikan intimidasi yang ia rasakan pada 9 Desember lalu. Butet mengaku peretasan tersebut merupakan intimidasi yang dilakukan terhadapnya karena menyuarakan satire-satire bernada politik dalam pemertan atau sosial media miliknya.

”Saya jelas diintimidasi. Dalam pernyataan saya tidak pernah menyebut institusi apapun, tapi WA dilumpuhkan. Faktanya memang lumpuh, saya tidak bisa WA ataupun telepon. Keluarga tidak bisa telepon, tidak nyambung,” jelas Butet.

Ia menambahkan, sebagai seniman, sejak remaja dia tumbuh di ranah pergulatan ide, gagasan dan pemikiran yang diartikulasikan dalam bahasa seni baik sebagai aktor, monolog maupun pelukis. Karenanya ketika dia diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak berbicara soal politik dalam pemertanannya, hal itu dipastikannya sebagai intimidasi.

”Ketika saya harus me-



Suasana hangat dalam Diskusi Bulanan Sintes



Butet Kartaredjasa saat menyampaikan pendapatnya dalam Diskusi Bulanan Sintes



Alam Panjaitan, ’owner’ Sintes

nandatangan pernyataan berkomitmen tidak bicara politik, apalagi maknanya kalau bukan pembungkaman. Kalau bukan intimidasi, dari fakta yang terjadi sudah menggambarkan proses yang abnormal dalam proses demokrasi,” sambungnya.

Butet pun mengaku, merasa sangat kecewa dengan Presiden Joko Widodo. Menjadi pendukung Jokowi sejak Pemilu 2014, Butet merasa di-prank Jokowi dengan membiarkan Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pasca keputusan perubahan usia capres/cawapres yang dibuat iparnya, Anwar Usman saat menjabat sebagai Ketua MK.

Banyak orang, lanjutnya, terpesona dengan kinerja Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Namun ternyata sosok yang selalu di-

dukungnya sebagai role model pemimpin baik, dari sipil justru mengkhianati demokrasi.

”Karenanya gimana pemilu netral karena wasitnya saja sudah mengakali. Netralitas sudah gugur didepan. Ketika kita menghantarkan Jokowi jadi presiden maka itu dia harusnya melakukan amanat demokrasi, tapi ternyata diprank, ndobos tapi kolektif. Bangsa ini dicerai,” tegasnya lagi.

Alam Panjaitan mewakili tuan rumah, Sintes Coffee & Space mengatakan dari diskusi diharapkan banyak muncul ide dan gagasan demi menjaga marwah demokrasi ke depan. Sintes Coffee & Space ia bangun sebagai tempat pertemuan antara ide, gagasan, diskusi hangat dan kopi yang akan menghasilkan banyak karya bagi anak muda. **(Yud)**

TINDAK LANJUT PENETAPAN PERGUB DIY 40/2023

Biro Tapem Lakukan Bimtek Kalurahan Reform-Space

YOGYA (KR) - Biro Tapem Setda DIY melaksanakan bimbingan teknis/bimtek Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) untuk menu kalurahan reform-space pada 20-23 November 2023. Bertempat di STPMD ”APMD” Yogyakarta, bimtek tersebut menghadirkan 392 web administrator SINKAL dari kalurahan se-DIY.

Dalam pelaksanaan bimtek tersebut, para peserta dibagi menjadi delapan angkatan, dan masing-masing angkatan didampingi oleh 2 (dua) orang fasilitator. Para peserta diberikan pelatihan cara mengisikan rencana aksi RB Kalurahan pada menu kalurahan reform-space.

Pergub DIY 40/2023 tentang Reformasi Kalurahan terdiri atas 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan Reformasi Birokrasi Kalurahan (RB Kalurahan), dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPM Kalurahan).

Khusus RB Kalurahan diarahkan dengan sasaran: pertama, terciptanya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja. Sasaran pertama ini terdiri atas 2 (dua) indikator yang masing-masing dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten, yakni Jumlah Pemerintah Kalurahan dengan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat Baik, dan Jumlah Pemerintah Kalurahan dengan hasil evaluasi kualitas belanja dengan kategori Baik.

Kedua, serta terciptanya

budaya pemerintahan dengan pamong kalurahan yang profesional dengan indikator Jumlah Pemerintah Kalurahan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kinerja pelayanan Baik. Bertindak sebagai evaluator adalah Pemerintah Kalurahan sendiri, memperhatikan capaian IKM tiap tahunnya.

RB Kalurahan terdiri atas 16 kegiatan utama, yakni : Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan; Pengembangan SAKIP Pemerintah Kalurahan; Penguatan Digitalisasi Kalurahan; Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan; Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan; Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan/Aset yang dikelola Kalurahan; Penguatan Pelaksanaan Penugasan Urusan Keistimewaan; Penguatan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Dinas Pemerintah Kalurahan; Penguatan Pengendalian Gratifikasi; Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan; Penguatan Regulasi Pemerintahan Kalurahan; Pengisian Pamong Kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN; Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan; Penerapan Budaya Pemerintahan; Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima; serta Pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kalurahan.

Ke-16 kegiatan utama



Pelaksanaan Bimtek Kalurahan Reform-Space di STPMD ’APMD’.

RB Kalurahan tersebut selanjutnya terbagi menjadi 48 bidang rencana aksi, dan 92 rincian kegiatan, yang kesemuanya dimuat dalam menu kalurahan reform-space pada SINKAL. Contohnya: untuk kegiatan utama Penguatan Digitalisasi Kalurahan, terdiri dari 2 (dua) rencana aksi, yakni: Pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; dan Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan secara digital.

Dua bidang rencana aksi untuk Penguatan Digitalisasi Kalurahan, terbagi lagi menjadi 3 (tiga) rincian kegiatan, yakni: 1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan administrasi pemerintahan dalam rangka mendukung tata laksana internal pemerintah Kalurahan dan pelayanan publik; 2) Sosialisasi layanan publik pemerintah Kalurahan yang berbasis teknologi informasi kepada masyarakat; dan 3) Pengelolaan database yang terstruktur,

update dan tertata baik di dalam penyimpanan data dan informasi digital pemerintah Kalurahan.

Kepala Biro Tapem Setda DIY, KPH Yudanegara PhD, menyampaikan bahwa setelah Pergub DIY 40/2023 ditetapkan, maka implementasi Reformasi Kalurahan resmi dilaksanakan. ”Kalurahan menjadi subjek atau pelaku utama perubahan, yang didorong melalui Reformasi Kalurahan”, kata Kanjeng Yudanegara.

Tahap awal pelaksanaan RB Kalurahan, tugas Pemerintah Kalurahan adalah membentuk Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kalurahan, kemudian menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi RB Kalurahan Tahun 2024-2027.

Kanjeng Yudanegara menambahkan, berkaitan dengan Rencana Aksi RB Kalurahan, penting dipahami bahwa selalu terbuka ruang pengakuan atau rekognisi, bahwa setiap Kalurahan mempunyai

cara sendiri-sendiri sesuai keragamannya untuk memajukan dirinya.

”Pergub DIY 40/2023 tidak mereduksi keragaman itu, namun memberikan standar baku yang bisa dikembangkan setiap oleh setiap Pemerintah Kalurahan”, ujarnya. Dirinya berharap, pada 2023 ini, Pemerintah Kalurahan se-DIY telah membentuk Tim Reformasi Kalurahan dan menyusun Rencana Aksi RB Kalurahan.

Contoh misalnya Kalurahan Pleret, yang telah melakukan digitalisasi dalam pelayanan publiknya (dapat dilihat pada pranala <https://pleret.id/>). Maka dalam konteks pelaksanaan RB Kalurahan, Kalurahan Pleret akan memasukkan kegiatan utama Penguatan Digitalisasi Kalurahan tersebut pada rencana aksi mulai tahun 2024 sampai 2027.

Kondisinya bisa berbeda untuk kalurahan lain, yang misalnya baru siap melakukan digitalisasi

pelayanan publik pada tahun 2025 atau setelahnya. Disinilah peran sentral Panewu untuk melakukan asesmen awal guna memotret kondisi awal tata kelola Pemerintahan Kalurahan, menggunakan parameter 16 Kegiatan Utama RB Kalurahan. Hasil asesmen awal digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi oleh Pemerintah Kalurahan.

”Ada baiknya setelah hasil asesmen awal Panewu muncul, dilakukan musyawarah oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal dalam penyusunan rencana aksi RB Kalurahan, sebelum di submit ke menu kalurahan reform-space”, tutup Kanjeng Yudanegara.

Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren pada Biro Tapem Setda DIY, Rini Sri Wahyuni SE MM menambahkan setelah rencana aksi RB Kalurahan disusun dan di submit ke SINKAL, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan rencana RB Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan.

”Di tengah pelaksanaan rencana aksi oleh Pemerintah Kalurahan nanti, dilakukan monitoring oleh Tim Reformasi Kalurahan Kabupaten dan Pemda DIY. Bentuknya bisa melalui kunjungan lapangan, atau pemantauan lewat SINKAL pada menu kalurahan reform-space ini”, lanjut Rini.

Kemudian pada setiap awal tahun anggaran berikutnya, dilakukan asesmen tahunan oleh Panewu untuk

mengetahui ketercapaian dampak pelaksanaan 16 Kegiatan Utama RB Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan di wilayahnya.

Hasil asesmen tahunan menjadi dasar bagi Pemerintah Kalurahan untuk menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut RB Kalurahan. ”Caranya cukup mudah, tinggal menambahkan atau melakukan perubahan penjabaran Rencana Aksi yang sudah ter-submit sebelumnya, menurut rincian kegiatan, target pelaksanaan dan pelaksanaannya”, terang Rini.

Analisis Kebijakan Muda pada Biro Tapem Setda DIY, Vandy Suharisman SIP MPA menambahkan, paralel dengan asesmen tahunan tersebut, dilakukan pula evaluasi pelaksanaan 16 kegiatan utama RB Kalurahan, dan pengukuran sasaran RB Kalurahan oleh Tim Reformasi Kalurahan Kabupaten (termasuk kapanewon) dan Pemda DIY.

”Tujuannya untuk memantau apakah pelaksanaan rencana aksi RB Kalurahan telah sesuai dengan tahapan dan target yang ditetapkan, serta menilai keberhasilan RB Kalurahan melalui ketercapaian target indikator sasarannya”, jelasnya.

Untuk mengoperasionalkan RB Kalurahan, Biro Tapem Setda DIY telah menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan RB Kalurahan, dan Modul RB Kalurahan sebagai panduan bagi Tim Reformasi Kalurahan Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan. ”Silahkan diunduh melalui website Biro Tapem”, ujar Vandy. **(Awh)-d**